

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keperilakuan Organisasi

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004) : Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu. Kejelasan tujuan diartikan ketika akan menerapkan SIKD, tujuan implementasi SIKD tersebut telah dijelaskan dan disepakati. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika kita akan mengimplementasikan SIKD tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan telah ada persetujuan tentang tujuan implementasi SIKD, serta SIKD bermanfaat bagi semua bagian dalam Departemen atau Dinas.

Boston et al (1996) mengidentifikasi *Public Choice theory*, teori *agensi* dan *transactional cost economics* sebagai paradigma yang dominan ketika siap untuk mereformasi pemerintah: *Public Choice theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi. *Public Choice* diaplikasikan sebagai usaha untuk peran pemerintah, meningkatkan transparansi dll., Teori Agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi, *Transactional Cost Economic* berfokus pada struktur pemerintah yang optimal.

Menurut Yin (1994) melakukan penelitian dengan *multiplicase design* dengan sub unit yang menjadi peran penting. Fokus pada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam organisasi secara umum dan Pettigrow (1992) melakukan penelitian yang lebih spesifik yang menyadari pentingnya kelas eksekutif inti yang mengontrol pengendalian dan alokasi sumber daya.

Penggunaan wawancara semi *directed* yaitu dengan menginterview CEO, direktur keuangan, direktur strategi dan orang-orang yang memegang peran pokok (pendidikan, pelayanan social, ekonomi). *Contingency Theory*, dipelopori oleh Burn dan Stalker (Otley, 1980), dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang task environment, Dalam penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan

praktek manajemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda.

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan

Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sesuai dengan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

International Monetary Fund (IMF), sebagai lembaga kreditor, menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debitornya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini, Karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi, basis akrual menyediakan estimasi

yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dapat dicatat, termasuk transaksi internal. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

- a. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
- b. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
- c. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
- d. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- f. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan entitas.
- g. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

Pramono Hariadi (2011) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sementara itu, menurut Mulyadi (2011) pengertian sistem akuntansi adalah sebagai berikut: “Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilaksanakan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses berupa analisis transaksi yang dituangkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan”. (Mulyadi,2011)

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangandalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu, maka hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun prosedur komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur yaitu:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

(PPK-OPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan peghapusan barang, surat keputusan mutase barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

d. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD).

Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

e. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas.

Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD).

Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pembangunan nasional membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut didapatkan dari berbagai potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang didapat digunakan dalam program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Kewenangan daerah dalam mengoptimalkan

PAD, akan memberikan peningkatan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berdasar pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, yang dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi.

Pendapatan adalah arus uang atau barang yang menguntungkan bagi seseorang, kelompok, individu, sebuah perusahaan atau perekonomian dalam beberapa waktu. Pendapatan bisa berasal dari penjualan jasa-jasa produktif (seperti : gaji, bunga, keuntungan, sewa, pendapatan nasional). Pendapatan Nasional adalah nilai seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam waktu satu tahun tertentu. Pendapatan Nasional dapat dihitung dengan tiga cara, yakni Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Nasional. (Sukirno Dalam Sumual, 2015) Definisi lain dan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dan hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi

keluarga dan dalam masyarakat. Macam-macam Pendapatan Daerah Menurut Sumual, (2015) :

a. Pendapatan dari gaji dan upah.

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktifitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas, sebagai berikut : - Keahlian (*Skill*) - Mutu Modal Manusia (*Human Capital*) - Kondisi Kerja (*Working Condition*)

b. Pendapatan dari Aset Produktif

Aset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua (2) kelompok aset produktif, pertama, asset finansial (*financial assets*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan defiden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjualbelikan. Kedua, asset buka financial (*real assets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

c. Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer payment adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compensation*), jaminan social bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kegunaan sistim akuntansi keuangan daerah telah banyak dilakukan. Diantaranya telah penulis rangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muji Mranani (2011)	Faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi Keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai Intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya penggunaan teknologi informasi dan konflik kognitif memiliki pengaruh positif pada kegunaan SAKD. Pelatihan dan kejelasan tujuan memiliki pengaruh positif pada konflik kognitif. Kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pemanfaatan sistem berpengaruh negatif terhadap konflik afektif dan pelatihan berpengaruh negatif terhadap konflik afektif. Konflik Kognitif berpengaruh positif pada kegunaan SAKD, tetapi tidak berpengaruh dengan konflik afektif. Konflik kognitif sebagai interverning variabel antara faktor perilaku organisasi dengan kegunaan SAKD, menunjukkan bahwa faktor perilaku organisasi memiliki hubungan positif terhadap Kegunaan SAKD, yang dimediasi oleh konflik kognitif. Konflik afektif sebagai variabel intervening antara faktor perilaku

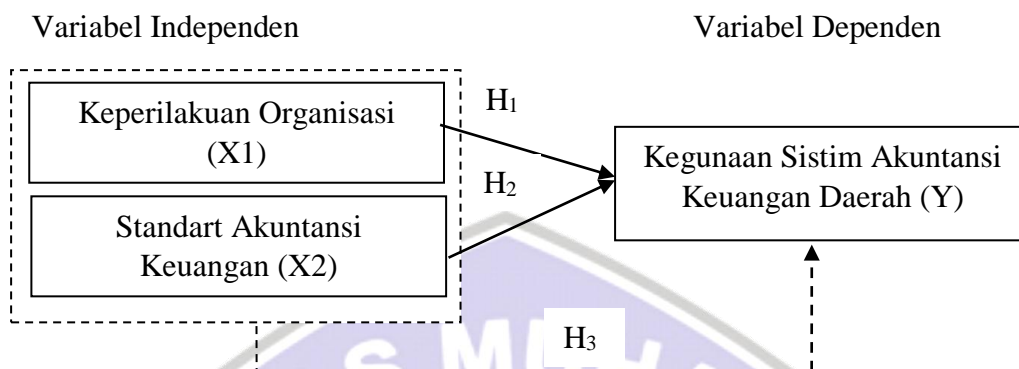
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			organisasi dengan kegunaan SAKD, berhubungan negatif.
2	Arindra Devi Susilawati (2017)	Pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi Keuangan daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Sleman)	Kesimpulan Penelitian ini adalah:menunjukkan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan Berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD.
3	Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih (2017)	Analisis faktor berperilaku organisasi terhadap Kegunaan sistem akuntansi keuangan di badan Keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera barat	Hasilnya pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4	Ayu Tinis	Pengaruh Faktor	a. Pelatihan berpengaruh

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Khaulia, Dwi Cahyono, dan Didik Eko Pramono (2019)	Keprilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	<p>terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p>b. Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p>c. Dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p>d. Pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p>
5	Naswan Hadilia dan Rosmina Tolafu (2020)	Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula)	<p>a. Dukungan atasan secara parsial berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p>b. Kejelasan tujuan secara parsial berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p>c. Pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.</p>

Sumber: Data diolah (2020)

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004) : Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu. Kejelasan tujuan diartikan ketika akan menerapkan SIKD, tujuan implementasi SIKD tersebut telah dijelaskan dan disepakati. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika kita akan mengimplementasikan SIKD tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan telah ada persetujuan tentang tujuan implementasi SIKD,

serta SIKD bermanfaat bagi semua bagian dalam Departemen atau Dinas. Chenal (2004) mengungkapkan bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2015 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang berlaku dalam rangka menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.4 Hipotesis

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi keuangan Daerah.

Faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi jalannya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru diimplementasikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut. Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti diimplementasikannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi faktor organisasional dalam implementasi yang akan diuji meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan

dukungan atasan. Shield (1995) berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan khawatir dalam proses implementasi.

Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mranani dan Lestiorini (2011) menunjukkan bahwa keperilakuan organisasi yang diwakili oleh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan tidak memiliki pengaruh terhadap kegunaan SAKD. Sementara itu hasil berbeda ditunjukkan oleh Susilawati dan Widodo (2017) yang menemukan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan SAKD.

Ho1 : Keperilakuan organisasi tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Ha1 : Keperilakuan organisasi berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Pengaruh standart akuntansi terhadap Kegunaan Sistim Akuntansi keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Norkamsiah, (2016) menjelaskan Sistem akuntansi adalah suatu metode atau prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks satau rumit.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas public adalah entitas yang memiliki dua criteria yang menentukan apakah entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik. (Norkamsiah, 2016)

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan

harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Nurlaela dan Rahmawati (2013) menjelaskan bahwa kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Menurut Latifah dan Sabeni (2017) menjelaskan bahwa kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan system karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Dari beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun hipotesis sebagai berikut:

Ho2 : Standart akuntansi tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Ha2 : Standart akuntansi berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

3. Pengaruh Keperilakuan Organisasi dan Penerapan Standart Akuntansi Keuangan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Perilaku organisasi dan penerapan standar akuntansi keuangan merupakan factor yang mampu mempengaruhi kegunaan SAKD.

Penerapan standart akuntansi keuangan yang tepat mampu menghasilkan informasi keuangan yang handal dan akurat. Penerapan standar akuntansi keuangan yang baru, akan berjalan dengan lancar apabila disertai dengan pelatihan terlebih dahulu. Adanya pelatihan juga akan membuat pegawai merasa nyaman dalam proses pengimplementasian karena pegawai telah merasa mahir. Selain dilakukan pelatihan, kejelasan tujuan juga dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya.

Penelitian Nurlaela dan Rahmawati (2013) menyatakan bahwa tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan kegunaan SAKD. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Latifah dan Sabeni (2017) yang memperoleh hasil bahwa tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan kegunaan SAKD. Penelitian yang dilakukan oleh Mranani dan Lestiorini (2015) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap SAKD, tidak diterima.

Ho3 : Keperilakuan organisasi dan penerapan standart akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Ha3 : Keperilakuan organisasi dan penerapan standart akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

